

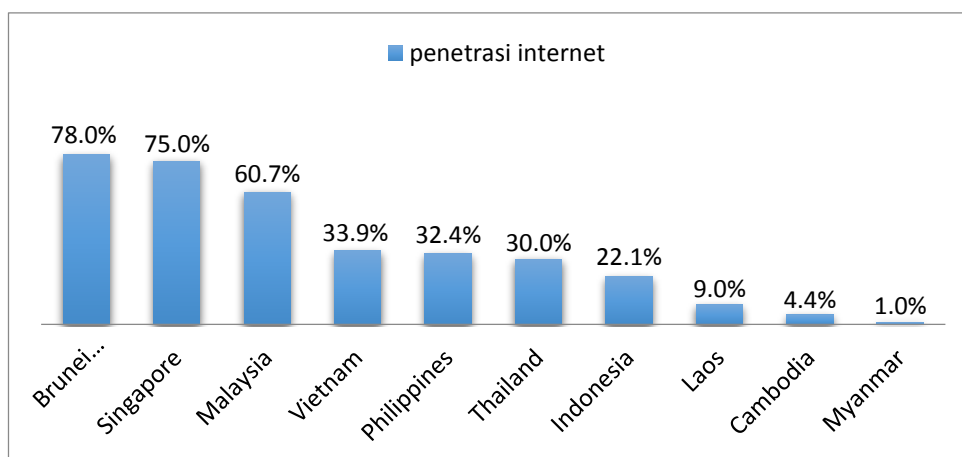
BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi terutama dalam bidang ICT (*Information and Communication Technology*) telah memberikan dampak yang sangat berarti bagi perubahan hidup manusia. Penerapan ICT khususnya teknologi *broadband* terbukti telah memberikan kontribusi di berbagai sektor seperti meningkatnya perkembangan ekonomi dan kualitas mutu pendidikan suatu Negara.

Namun terdapat masalah dimana penetrasi internet ini masih belum bisa merata ke berbagai daerah dari suatu Negara. Kondisi ini disebut dengan kesenjangan digital (*digital divide*) yang diartikan sebagai kesenjangan yang terjadi pada entitas masyarakat mulai dari individu, rumah tangga, bisnis, dan berbagai area yang dapat mengakses jaringan *broadband* ini dengan yang tidak dapat mengakses serta memanfaatkan teknologi tersebut ke dalam berbagai kegiatan produktif sehingga memberikan nilai lebih dalam hasilnya (OECD, 2001).

Perkembangan teknologi internet terutama di Indonesia dinilai sangat kurang dan tertinggal dari beberapa negara di Asia Tenggara sendiri. Dibandingkan dengan Negara ASEAN lainnya penetrasi internet di Indonesia masih memberikan angka yang kecil, kondisi tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar I.1 Penetrasi Internet di ASEAN
(Sumber : *Internet World Stats*, 2012)

Pemerintah memberikan respon positif dalam mengatasi masalah *digital divide* tersebut dengan memberlakukan program bantuan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) terhadap daerah yang masih belum merasakan penetrasi internet. Program bantuan tersebut juga dilakukan pada tingkat daerah seperti di kabupaten Bandung dengan memberikan program BIM (Balai Informasi Masyarakat) yang ditujukan ke kecamatan yang ada pada wilayah Kabupaten Bandung. Program BIM merupakan salah satu nama program bantuan TIK dari pemerintah daerah Bandung dan bantuan ini dilaksanakan pada kecamatan Katapang.

Sebagai percobaan dalam pemberian bantuan TIK ini terdapat dua kecamatan yang telah diberikan bantuan yaitu kecamatan Katapang dan Kecamatan Cilengkrang. Namun setelah diberikan bantuan TIK terhadap kedua kecamatan, kelanjutan dari bantuan yang diberikan tidak memberikan dampak positif bagi perkembangan hidup dari kedua daerah tersebut. Kegagalan dalam pelaksanaan program bantuan TIK disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya dikarenakan penentuan wilayah layanan yang kurang tepat sasaran. Oleh karena itu, diperlukan antisipasi dimana dapat dilakukan penetapan wilayah layanan yang akurat dalam pemberian bantuan TIK dengan alasan yang jelas dan kuat (Rohayati, 2013).

Terdapat beberapa kekurangan penggunaan pendekatan dalam memberikan bantuan TIK tersebut ke daerah yang dituju yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung. Pemerintah hanya memberikan bantuan berdasarkan kebutuhan yang diinginkan dari daerah Cilengkrang dan Katapang. Kondisi ini dinamakan pendekatan *need-based* yang mana telah memberikan pengaruh yang belum signifikan setelah dilakukan pemberian bantuan.

Dengan pemberian pendekatan *need-based*, pemerintah hanya memberikan bantuan berdasarkan kekurangan yang ada pada desa yang akan diberi bantuan. Namun dengan pendekatan ini telah memberikan efek samping yang berkepanjangan di mana kelanjutan pemberdayaan dari bantuan tersebut tidak dapat terurus dengan baik. Kemampuan sumber daya manusia (SDM) dari daerah penerima bantuan telah memberikan gambaran ketidaksiapan dalam mengelola bantuan. Ketidaksiapan ini tidak dilihat pemerintah sebagai dampak jangka

panjang yang mungkin terjadi. Karena salah satu faktor tersebut pemberian bantuan TIK dengan pendekatan *need-based* mengalami kegagalan.

Dilakukan juga pengumpulan informasi melalui *depth interview* dengan pengelola program bantuan pada kecamatan Cilengkrang dan Katapang, terungkap masalah program bantuan TIK tersebut tidak berjalan dengan baik dikarenakan kurangnya keterlibatan masyarakat setempat, kurang sosialisasi dan pembinaan, serta tidak adanya koordinasi antara para *stakeholder* dengan kecamatan yang diberikan bantuan. Di lain sisi tujuan dari pemberian bantuan TIK pada kecamatan Cilengkrang dan Katapang masih belum jelas dan terarah.

Diperlukan pendekatan lain dalam menentukan lokasi penerimaan bantuan BIM tersebut kepada daerah yang ingin dituju. Oleh karena itu dalam pemberian program bantuan TIK tersebut dapat menggunakan pendekatan berbasis aset yang dimiliki dalam suatu komunitas.

Pendekatan ini disebut *Asset-based Community Development* (ABCD) yang merupakan teori dari Kretzmann dan McKnight (Pinkett, 2002). ABCD merupakan pendekatan yang menjelaskan daerah potensial merupakan daerah yang memiliki berbagai aset yang ada pada komunitas tersebut. Aset bisa diartikan berbagai hal seperti aset individual (kepemilikan lahan, kemampuan individu lainnya), atau bisa berupa aset lokasi (keberadaan lokasi komunitas yang bersinggungan dengan potensi wisata).

Pendekatan ABCD merupakan pendekatan pengembangan komunitas dengan konsep *bottom up*. Pendekatan dengan sifat *bottom up* dirasa lebih baik dibandingkan pendekatan yang bersifat *top down* (Larrison, 1999). Setelah dilakukan kajian terhadap pendekatan ABCD ternyata program yang dilakukan dengan model *bottom up* memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan model *top down*, serta hasil yang ditunjukkan menunjukkan kepuasan yang lebih tinggi. Dengan hasil dari kajian tersebut direkomendasikan untuk menggunakan pendekatan ABCD ini dalam pemberian bantuan terhadap suatu wilayah atau komunitas.

Aset komunitas merupakan segala kelebihan yang dimiliki suatu komunitas dimana dengan potensi yang dimiliki dapat memberikan perubahan hidup bagi individu maupun kelompok yang ada dalam komunitas tersebut. Aset komunitas tersebut akan menjadi potensi untuk pengembangan komunitas itu sendiri. Aset komunitas merupakan salah satu faktor penting dalam metode ABCD ini dikarenakan pendekatan tersebut melihat potensi yang ada pada suatu daerah. Dengan adanya pendekatan berbasis aset ini tidak menghilangkan kebutuhan terhadap sumber daya dari luar, tetapi menjadikannya lebih efektif (Rohayati, 2013).

Pemetaan aset komunitas dibantu menggunakan *software* berbasis *Geographic Information System* (GIS) dengan memetakan satu persatu aset komunitas yang dimiliki suatu daerah dengan diwakili simbol pada pemetaannya di aplikasi. Dengan bantuan *software* ini berbagai aset komunitas yang dimiliki suatu daerah dapat dilihat dengan lebih mudah karena sudah bisa ditampilkan dalam sebuah aplikasi.

Telah dilakukan pemetaan aset komunitas tersebut dan telah diperhitungkan pula pada penelitian sebelumnya kecamatan-kecamatan pada kabupaten Bandung yang teridentifikasi memiliki aset komunitas yang ditentukan. Hasil perhitungan *ranking* kecamatan berdasarkan aset komunitas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel I.1 *Ranking* Aset Komunitas Kecamatan Kabupaten Bandung

Kecamatan	Nilai Kecamatan	<i>Ranking</i>
Pangalengan	1205	1
Ciparay	1279	2
Rancaekek	1321	3
Baleendah	1353	4
Paseh	1392	5
Majalaya	1411	6
Soreang	1546	7
Banjaran	1576	8
Cicalengka	1656	9
Arjasari	1693	10

Tabel I.1 *Ranking* Aset Komunitas Kecamatan Kabupaten Bandung (Lanjutan)

Kecamatan	Nilai Kecamatan	<i>Ranking</i>
Margaasih	1696	11
Ibun	1737	12
Cimencyan	1754	13
Cimaung	1761	14
Cileunyi	1767	15
Pacet	1768	16
Pasirjambu	1795	17
Katapang	1812	18
Kutawiringin	1880	19
Ciwidey	1986	20
Bojongsoang	1993	21
Margahayu	2037	22
Cikancung	2054	23
Dayeuhkolot	2075	24
Cangkuang	2184	25
Kertasari	2284	26
Solokan Jeruk	2267	27
Nagreg	2302	28
Cilengkrang	2434	29
Pameungpeuk	2436	30
Rancabali	2538	31

Dari hasil perhitungan pada tabel tersebut diperoleh kecamatan Pangalengan dan Ciparay sebagai kecamatan potensial penerima bantuan TIK.

Pada penelitian ini dilakukan pemetaan aset komunitas pada tingkat desa di seluruh wilayah Ciparay. Akan dilakukan pula perhitungan desa layanan penerima

bantuan TIK pada wilayah kecamatan Ciparay. Desa dengan *ranking* tertinggi dari indeks yang telah ditentukan akan dijadikan desa layanan penerima bantuan TIK.

I.2 Perumusan Masalah

1. Data penyusun aset komunitas apa saja yang dimiliki oleh desa-desa di wilayah kecamatan Ciparay?
2. Desa mana saja kah yang menjadi desa layanan penerima bantuan TIK di kecamatan Ciparay dengan metode ABCD?
3. Bagaimana pemetaan aset komunitas yang ada pada desa-desa di wilayah kecamatan Ciparay dengan bantuan *Geographic Information System* (GIS)?

I.3 Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi data penyusun aset komunitas yang dimiliki oleh desa-desa di wilayah kecamatan Ciparay.
2. Menentukan desa prioritas penerima bantuan TIK pada kecamatan Ciparay dengan metode ABCD.
3. Memetakan aset komunitas desa pada wilayah kecamatan Ciparay dengan bantuan *Geographic Information System* (GIS).

I.4 Batasan Masalah

1. Pemetaan aset komunitas yang ditampilkan hanya meliputi 5 komponen aset komunitas yaitu aset individu, institusi, asosiasi, ekonomi lokal, serta fasilitas fisik sesuai dengan teori Kretzmann & McKnight (1993).
2. Sistem informasi ini hanya sebatas pada menampilkan pemetaan aset komunitas saja bukan sebagai aplikasi pengolahan data aset komunitas pada kecamatan Ciparay.

I.5 Manfaat Penelitian

1. Membantu pemerintah untuk mengidentifikasi aset komunitas yang dimiliki desa-desa pada suatu wilayah kecamatan.
2. Sebagai rekomendasi dalam memberikan bantuan TIK kepada daerah yang dituju dengan melihat aset komunitas yang dimiliki masing-masing desa.

I.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan

Pada bagian pendahuluan akan dimuat latar belakang penelitian ini dilakukan, rumusan masalah yang diangkat, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II Landasan Teori

Pada bab ini akan dibahas berbagai teori yang mendasari penelitian ini dilakukan. Literatur yang digunakan diantaranya mengenai teori *digital divide*, aset komunitas dan elemennya, matriks indeks kesiapan dan ekonomi desa, dan *Geographic Information System (GIS)*

BAB III Metodologi Penelitian

Pada bab ini akan dibahas metode penelitian, kerangka, beserta langkah-langkah yang dilakukan untuk penyelesaian masalah dalam penelitian meliputi pengumpulan data, identifikasi aset komunitas, penentuan desa layanan, dan pembuatan aplikasi pemetaan aset komunitas berbasis GIS.

BAB IV Pengumpulan Data dan Penentuan Desa Layanan Penerima Bantuan

Pada bab ini akan dibahas mengenai proses pengumpulan data dan perhitungan dalam menentukan desa layanan penerima bantuan TIK.

BAB V Pengembangan Aplikasi Pemetaan Aset Komunitas.

Pada bab ini akan membahas tahapan dalam merancang aplikasi pemetaan aset komunitas. Meliputi rancangan sistem informasi dan desain aplikasi pemetaan aset komunitas.

BAB VI Implementasi Aplikasi dan Analisis Desa Terpilih

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai implementasi aplikasi pemetaan aset komunitas dan analisis desa penerima bantuan TIK.

BAB VII Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan. Saran yang diberikan kepada pihak terkait dan saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya.